

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara nasional pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan berkelanjutan dengan sasaran menciptakan landasan kuat bagi bangsa Indonesia dengan tujuan menuju masyarakat yang makmur, adil, serta sejahtera sesuai dengan isi Pancasila dan UUD 1945 (Alhudhori, 2017). Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan, pemerataan, juga mempertimbangkan dampak kegiatan ekonomi pada pola hidup masyarakat agar terciptanya peningkatan kesejahteraan. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Di beberapa Negara berkembang khususnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menjadi sasaran utama pembangunan (Alhudhori, 2017).

Sampai saat ini ketenagakerjaan masih menjadi masalah utama di Indonesia, munculnya permasalahan ini dikarenakan masih adanya kesenjangan dalam kesempatan kerja yang diberikan. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang cukup penting di kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat aspek ekonomi dan sosial. Di Negara berkembang seperti Indonesia pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan meratakan pembangunan ekonomi, menyeimbangkan struktur ekonomi yang ada, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di Negara

berkembang permasalahan utama yang dihadapi adalah meningkatkan jumlah penduduk setiap tahunnya yang pesat mengakibatkan timbulnya masalah tersendiri. Belum berfungsinya semua sektor dengan maksimal dan belum meratanya pembangunan ekonomi di setiap bidang mengakibatkan lapangan pekerjaan yang tersedia belum cukup memadai kebutuhan (Ardiansyah dkk, 2018).

Demi meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan, pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyerapan tenaga kerja.

Keadaan pasar tenaga kerja Indonesia terus mengalami perkembangan, pada tahun 2016 diketahui jumlah penduduk Indonesia sekitar 261,1 juta jiwa, sebanyak 125,4 juta bergabung dalam angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja baru pada tahun 2015 sekitar 2.886.288 juta, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 2.448.915 juta, kemudian meningkat pada tahun 2017 sekitar 2.669.469 juta jiwa (Putri & Soelistyo, 2018).

Jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2021 terus mengalami peningkatan. Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 22.319.145 juta jiwa sedangkan penyerapan tenaga kerja terendah pada tahun 2006 sebesar 17.669.660 juta jiwa. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran akan tenaga kerja di pasar tenaga kerja terus meningkat, namun

pertambahan penawaran tenaga kerja ini tidak diikuti dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga pengangguran tetap ada.

Inflasi menjadi salah satu faktor yang tak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terukur dan terkendali dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu negara agar dapat terus meningkat diikuti masyarakat yang hidup lebih sejahtera (Iksan, Arifin and Suliswanto, 2020), akan tetapi inflasi yang tidak terkendali dan tidak terukur menyebabkan suatu negara menjadi tidak stabil, karena meningkatnya harga jual bahan-bahan produksi dapat berimbas pada sektor lain yang menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang produksi yang ikut melonjak harganya akibat inflasi.

Tinggi rendahnya nilai inflasi menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam merekrut atau menurunkan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan. Tingkat inflasi yang tinggi membuat harga-harga bahan produksi menjadi mahal, hal ini akan mempengaruhi para pengusaha dalam mengurangi faktor produksi termasuk tenaga kerja. Tingkat inflasi di Jawa Timur setiap tahunnya berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,66% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,44%. Inflasi yang terjadi di Jawa Timur termasuk dalam kategori inflasi ringan karena tingkat inflasi dibawah 10 persen per tahun.

, Inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur selalu dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi *hyper* inflasi dan tidak menyebabkan kenaikan harga barang-barang produksi maupun jasa. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi berbanding lurus dengan target pembangunan yang

telah direncanakan. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat Inflasi yang masih terkendali (BPS, 2020). Dalam keadaan terkendalnya Inflasi, perputaran ekonomi cenderung stabil akan tetapi apabila Inflasi terjadi kenaikan diluar kendali akan terjadi permasalahan ekonomi, (Marliana, 2022).

Kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok rumah tangga secara terus menerus diluar kendali biasa disebut Inflasi, Inflasi termasuk ke dalam fenomena moneter yang di sebabkan oleh beberapa sebab seperti *supply & demand*, ongkos produksi yang naik, kenaikan gaji, serta jumlah uang yang beredar di masyarakat. Inflasi sangat berdampak bagi tatanan ekonomi seperti hilangnya suatu value dari mata uang, bunga simpanan bank yang tinggi, daya beli dan daya jual yang rendah sehingga menyebabkan ekonomi suatu negara menjadi lesu, melemahnya kegiatan ekonomi dalam suatu negara dapat menyebabkan sektor-sektor lain terganggu seperti Penyerapan Tenaga Kerja.

Selain Inflasi, Penyerapan Tenaga Kerja juga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh dalam seluruh sektor disuatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB yang tergolong baik mampu meningkatkan keinginan produsen untuk menambah output produksi agar dapat menjual lebih banyak produk kepada pasar, yang dimana setiap terjadi penambahan output produksi terdapat faktor produksi yang tidak dapat dipisahkan yaitu Tenaga Kerja yang pasti akan lebih banyak di butuhkan sehingga PDRB mampu membuat Penyerapan Tenaga Kerja meningkat (ziyadaturrofiqoh; zulfanetti; muhammad safri, 2018).

Inflasi serta PDRB bukan satu satunya faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, keduanya merupakan faktor yang mempengaruhi secara eksternal lingkup Ketenagakerjaan, secara internal Upah minimum juga dapat mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di setiap perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan upah kepada pegawainya/buruhnya sesuai dengan value output yang dijualnya yang dimana margin dari produksi dan nilai jual merupakan sumber pendapatannya. Meningkatnya upah ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena dengan naiknya tingkat upah yang dilakukan diharapkan juga akan ada peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi, namun dalam berbagai kasus yang terjadi upah justru dapat berpengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja(Iksan, Arifin and Suliswanto, 2020).

Melihat fenomena di atas, Penyerapan Tenaga Kerja menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, menjaga laju inflasi, meningkatkan jumlah PDRB, serta menjaga Upah Minimum tetap stabil masih belum mampu membuktikan bahwa masyarakatnya sejahtera. Menurut penelitian, hasil estimasi menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah (Rochmani, Purwaningsih and

Suryantoro, 2017).

Berdasarkan penelitian, PDRB, Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja memiliki hubungan yang erat satu sama lain, PRDB yang tinggi akan membuat perusahaan menambah jumlah karyawan dengan menyerap tenaga kerja untuk menambah jumlah produksi guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu Upah Minimum yang tinggi dapat membuat perusahaan enggan menambah jumlah karyawan/menyerap tenaga kerja karena ketidakmampuan perusahaan atau penilaian perusahaan terhadap penambahan karyawan tidak terlalu dibutuhkan jika dibandingkan harus mengeluarkan dana yang besar untuk memberika upah kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku (Indradewa and Natha, 2015). Selain itu dari penelitian juga di dapatkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, secara parsial PDRB dan Upah Minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali (Indradewa and Natha, 2015).

Melihat keterkaitan tersebut, menjaga kestabilan Inflasi, dan Upah Minimum menjadi hal utama dalam menstabilkan Penyerapan Tenaga Kerja, besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto juga dapat mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di sutau daerah. Dari asumsi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Apakah PDRB berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2006-2021. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan variabel inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum, sebagai variabel independen (bebas) dan variabel angkatan kerja sebagai variabel dependen (terikat) sebagai alat ukur untuk mengetahui atau mengukur seberapa banyak tenaga kerja yang terserap di Provinsi Jawa Timur dengan metode Regresi Linier Berganda.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta bahan studi komparatif penelitian lain yang berkaitan dengan analisis pengaruh kemiskinan, pengangguran dan sektor pariwisata terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.
2. Bagi Universitas, dapat menambah acuan akademis dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur & perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas ataupun memecahkan masalah yang sama.

3. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus melatih diri untuk memecahkan masalah.